

## PERERAT HUBUNGAN RI-UEA

# Tol Japek II Berubah Jadi Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed

Oleh Thresa Sandra Desfika

BEKASI - Pemerintah mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed mulai 12 April 2021. Adapun Sheikh Mohamed Bin Zayed adalah putra mahkota Abu Dhabi dan wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA).

Peresmian perubahan nama itu dilaksanakan di akses masuk Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed dari arah Jakarta Km 10A oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Duta Besar UEA untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri.

"Mulai dari pagi ini saya dan Pak Menteri PUPR atas nama Bapak Presiden secara resmi mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated resmi menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed," kata Pratikno saat memberikan sambutan di acara peresmian nama Tol Japek II Elevated.

Dia menjelaskan, jalan layang tersebut merupakan jalan layang terpanjang di Indonesia sejauh 36 kilometer. "Pagi hari ini saya Menteri Sekretaris Negara dan Pak Basuki Menteri PUPR diperintah Bapak Presiden untuk meresmikan perubahan nama jalan layang sepanjang 36 kilometer lebih dan ini merupakan jalan layang terpanjang di Indonesia," sebut dia.

Pratikno menjelaskan, alasan perubahan nama Tol Japek II Elevated menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed. Pertama, hubungan kedua negara sejak 1976 semakin lama semakin akrab, baik itu di bidang sosial, kebudayaan, maupun ekonomi.

"Di bidang ekonomi investasi dari UEA merupakan salah satu investasi terbesar di Indonesia, baik itu untuk pembangunan infrastruktur maupun dukungan terakhir dalam volume yang besar pada INA (Indonesia Investment

Authority), yakni lembaga *Sovereign Wealth* Indonesia yang dibentuk beberapa waktu lalu," ungkap Pratikno.

Kedua, terang Pratikno, adalah Pemerintah UEA juga sebelumnya telah mencanangkan nama Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi yang merupakan sebuah jalan di jalan utama yang strategis antara Abu Dhabi National Exhibition Centre menuju ke arah kompleks kedutaan.

"Jadi itulah latar belakang dari perubahan nama ini. Maka pada pagi hari ini. Mulai dari pagi ini, saya dan Pak Menteri PUPR atas nama Bapak Presiden secara resmi merubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated resmi menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed," kata Pratikno.

Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri mengucapkan, terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Indonesia yang mengubah nama Tol Japek II Elevated menjadi Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed. Menurut dia, hal itu merupakan penghormatan yang sangat besar kepada Sheikh Mohammed Bin Zayed selaku putra mahkota Abu Dhabi sekaligus wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata UEA.

"Mewakili pemerintah Uni Emirat Arab, saya mau menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menamai jalan yang sangat strategis dan vital ini atas nama Syaikh Mohammed Bin Zayed," ujar dia.

Al Dhaheri mengatakan, Pemerintah UEA sangat bahagia dan senang atas apresiasi tersebut. Hal itu seolah jadi momentum positif dari hubungan bilateral Indonesia-UEA yang telah berjalan

sejak 1976. Oleh karena itu, lanjut dia, UEA berkomitmen memperluas cakupan investasinya. Tak hanya berupa minyak bumi dan gas, UEA juga ingin berkolaborasi pada sektor pertanian hingga ritel dengan RI.

"Kami telah beranjak dari sekadar hubungan tentang minyak bumi dan gas, kepada area kolaborasi seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, investasi, ritel, perbankan, dan banyak area kolaborasi lain yang bersangkutan dengan kepentingan orang-orang Indonesia. Kami ingin terus melanjutkan lebih banyak kerja sama perdagangan dalam waktu dekat. Terima kasih dan salam damai dari Pemerintah UEA, dan Sheikh Mohammed Bin Zayed patut mendapatkan penamaan jalan tol ini," pungkas Al Dhaheri.

## Menarik Investor

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, penamaan baru Jalan Tol Japek II Elevated merupakan kesepakatan bilateral antara Pemerintah RI dan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, kata Danang, pemerintah berharap dengan perubahan nama tol itu dengan menggunakan nama putra mahkota Abu Dhabi, bisa menarik minat para investor asal Timur Tengah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan jalan tol di Tanah Air.

"Kalau boleh bicara harapan, di sektor jasa jalan tol ini investor-investor dari Timur Tengah ini *kan* belum banyak yang masuk. Harapan kami dengan adanya Jalan Tol Layang MBZ ini cukup banyak investor Timur Tengah yang menaruh minatnya untuk investasi di jalan tol Indonesia," ujar Danang.

Lebih jauh, Danang menuturkan, Ruas Tol Japek II Elevated diharapkan menjadi salah satu ruas yang akan dilakukan divestasi oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Program divestasi tersebut bisa melalui kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) ataupun investor lain yang siap berinvestasi langsung ke ruas tol tersebut.

"Jasa Marga baru mulai semester II akan mulai program divestasi. Jadi harapan saya Jasa Marga juga masukan ruas tol ini sebagai program divestasi Jasa Marga untuk investor. Mudah-mudahan Timur Tengah tertarik untuk masuk ke sini," ujar Danang.



## Peresmian Pergantian Nama Tol Layang Japek

Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Saled Obaid Al Dhaheri (kdua kiri) memberikan sambutan saat menghadiri acara peresmian pergantian nama tol Jakarta-Cikampek II layang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/4/2021). Tol layang Japek resmi berubah nama menjadi Jalan Layang MBZ (Mohamed Bin Zayed).

## Stasiun KA Cepat Bertambah Satu di Padalarang

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah pembangunan satu stasiun pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yakni stasiun di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Proyek kerja sama Indonesia dan Tiongkok itu semula hanya merencanakan empat stasiun, yakni stasiun di wilayah Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Penambahan stasiun tersebut terungkap ke media massa dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan ke beberapa lokasi pembangunan Kereta Cepat

Jakarta Bandung pada Senin (12/4). Luhut didampingi oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta turut hadir Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok Xiao Qian.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KCIC saat kunjungan Luhut itu, penambahan stasiun di Padalarang dilakukan untuk memberikan pilihan kenyamanan terintegrasi yang lebih baik untuk masyarakat. Penambahan titik ini nantinya diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitar.

"Saya ingin dipastikan seluruh pembangunan di Stasiun Padalarang

ini akan selesai pada Bulan Juli, nanti akan saya tinjau kembali pembangunannya," ungkap Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin (12/4).

Lokasi pembangunan yang ditinjau oleh Menko Marves beserta rombongan adalah Stasiun Padalarang, Stasiun Tegalluar, depo angkutan rel Tegalluar, dan fasilitas *track laying* Tegalluar. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui kondisi pembangunan stasiun seiring dengan adanya rencana penambahan titik stasiun di Padalarang.

"Pembangunan di Stasiun Tegalluar serta pengerjaan pemasangan rel akan selesai pada bulan Oktober dan akan kita tinjau kembali kesiapannya," lanjut Menko Luhut. (esa)

## Kontrak Proyek KPBU AP Jalintim Riau Resmi Diteken

JAKARTA-Kontrak proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Riau senilai Rp 585,3 miliar resmi diteken. Perjanjian ditandatangani oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Bina Marga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Adhi Jalintim Riau sebagai pemenang lelang.

"Selamat bekerja buat PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Jalintim Riau. Kalau selamatnya sudah yang lalu, sekarang selamat bekerja untuk melaksanakan apa yang sudah ditandatangani pada hari ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya, Senin (12/4).

Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Bank Syariah Indonesia sebagai *back up* PT Adhi Jalintim Riau. Selain itu, ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah mendukung proyek KPBU AP Preservasi Jalintim Riau dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Terkait proyek preservasi jalan, Basuki menilai yang terpenting justru mengaktifkan jembatan timbang karena apa pun yang dibangun Kementerian PUPR jika tanpa ada kontrol terhadap beban kendaraan yang melewati jalan, ketahanan jalan tidak akan sesuai dengan rencana.

"Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung untuk pemeliharaan jalan di Jalintim Riau ini," imbuhnya.

## Shifting Belanja

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman juga menyampaikan proyek KPBU AP Jalintim Riau merupakan jalan nontol kedua setelah proyek KPBU AP Jalintim Sumsel yang sukses mencapai *financial close* pada Januari 2021 kemarin.

Tentu, kata Luky, hal ini bukan perjalanan yang mudah mengingat proyek KPBU Jalintim Riau pada proyek KPBU AP ditetapkan berbarengan dengan Jalintim Sumsel pada tahun 2018. Oleh karena kebijakan tersebut, Kementerian PUPR harus melakukan *shifting* belanja preservasi jalan yang biasa dialokasikan dalam belanja modal setiap tahunnya, menjadi KPBU AP.

Perubahan paradigma pembiayaan proyek ini dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Kementerian PUPR selaku PJPK dengan mendahulukan proyek Jalintim Sumsel dan memastikan pasar bisa menerima skema proyek KPBU nontol. Hasilnya, lanjut Luky, untuk proses transaksi Jalintim Riau ini tergolong jauh lebih cepat dan lancar dibanding Jalintim Sumsel.

Luky juga berterus terang bahwa pada 2021, APBN masih dalam kondisi 'menantang' terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan yang belum kembali normal. Namun demikian, ia juga memahami bahwa APBN harus tetap mengupayakan pemenuhan kebutuhan belanja sebagai bagian dari kebijakan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian, termasuk belanja infrastruktur.

"Untuk itu, dalam merancang APBN ini kami masih menerapkan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan target defisit APBN berada di kisaran 5,7% dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun target defisit APBN ini lebih kecil dibanding tahun lalu yang realisasinya mencapai 6,09% dari PDB, tapi kami tetap harus hati-hati," tutur Luky. (mwd)

## CIMB NIAGA

### PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") Perseroan tanggal 9 April 2021, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Final Tahun Buku 2020 dalam bentuk tunai ("Dividen") kepada para pemegang saham Perseroan sebesar-besarnya Rp1.098.577.683.881 (gross) atau setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020. Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, baik pemegang saham kelas A maupun kelas B ("Saham") yang seluruhnya berjumlah 24.933.626.961 saham (setelah dikurangi saham treasury), sehingga setiap pemegang/pemilik 1 (satu) saham akan memperoleh Dividen sekurang-kurangnya Rp44,06 (gross). Jadwal, ketentuan dan tata cara pembagian Dividen tersebut, ditetapkan sebagai berikut:

#### A. Jadwal:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 19 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 20 April 2021
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2021
- Recording Date pemegang saham yang berhak : 21 April 2021
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 22 April 2021
- Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020 : 7 Mei 2021

#### B. Ketentuan dan tata-cara pembagian Dividen:

- Iklan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham;
- Dividen akan dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2021 (paling lambat 30 hari setelah diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan) kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2021 pukul 16:00 WIB ("Recording Date"), atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan tanggal 21 April 2021;
- Para pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scripless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
  - Dividen akan dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI.
  - Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
  - Pemegang saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Bima Registrasi ("BAE"), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Pemegang saham diminta agar menghubungi BAE pada setiap hari kerja pukul 09:00 - 15:00 WIB, dengan alamat di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia, Telp: (+6221) 25984818, Faks: (+6221) 25984819, dan e-mail: [dividen@bimaregistra.co.id](mailto:dividen@bimaregistra.co.id), dengan menyerahkan:
    - Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan memperlihatkan aslinya (bagi pemegang saham perorangan);
    - Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai fotokopi bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
    - Fotokopi anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut serta fotokopi identitas diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut (bagi pemegang saham badan hukum);
    - Memberitahukan nomor rekening Bank (atas nama pemegang saham);
  - BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim.
  - Perseroan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank setelah mendapat konfirmasi dan validasi dari BAE.
- Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai perjanjian Persewaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* yang mengizinkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, agar mengirimkan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk:
  - Formulir *Directorate General of Taxation* ("DGT") asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, dilandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR); atau
  - Tanda Terima SKD dari sistem Direktorat Jenderal Pajak dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a. di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia; selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:
    - KSEI bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scripless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
    - BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).
- Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau Tanda Terima SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.
- Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Informasi pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan ([www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)).

Jakarta, 13 April 2021

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretariat Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 - Jakarta Selatan 12190

Telp: (+6221) 250 5252, Faks: (+6221) 252 6749,

e-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id); Situs Web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)

## CIMB NIAGA

### ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS ON DIVIDEND DISTRIBUTION PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Referring to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk (the "Company") dated 9 April 2021, it is hereby announced that the Company will distribute Final Cash Dividend for the Financial Year 2020 ("Dividend") to the Company's shareholders at the maximum of IDR1,098,577,683,881 (gross) or maximum 60% of the Net Income of the Company for the Financial Year 2020. The Dividend will be distributed to all Company's shareholders, both the shareholders of Class A and Class B shares ("Shares") in the total of 24,933,626,961 shares (after deducted with the treasury stock), therefore each owner/holder of 1 (one) share will get Dividend at the minimum of IDR44.06 (gross).

Schedule, procedures and mechanisms of the Dividend distribution are determined as follows:

#### A. Schedule:

- Cum Dividend - Regular and Negotiation Market : 19 April 2021
- Ex-Dividend - Regular and Negotiation Market : 20 April 2021
- Cum Dividend - Cash Market : 21 April 2021
- Recording date for eligible shareholders : 21 April 2021
- Ex-Dividend in Cash Market : 22 April 2021
- Dividend Payment for the Financial Year 2020 : 7 May 2021

#### B. Procedures and mechanisms of the Dividend distribution:

- This announcement is an official announcement from the Company, hence the Company does not issue a special announcement letters to the Company's shareholders;
- Dividend will be distributed on 7 May 2021 (maximum 30 days after approval from the shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company) to the shareholders whose name are recorded in the Company's Shareholders Register (*Daftar Pemegang Saham* - "DPS") on 21 April 2021 at 16:00 Western Indonesian Time ("Recording Date"), or in accordance with the securities account balance in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing date of 21 April 2021;
- Shareholders whose shares are recorded scripless in the Collective Custody of KSEI:
  - Dividends will be paid into the account of the Securities and/or the Custodian Bank at one of the KSEI Payment Bank.
  - Written confirmation regarding the result of Dividend distribution will be submitted by KSEI to the Securities Company and/or Custodian Bank.
  - Shareholders will receive information on their securities account balance from Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders open their account.
- Shareholders whose shares are recorded in the form of script at the Share Administration Bureau of PT Bima Registrasi ("BAE"), the following procedures shall apply:
  - Shareholders are requested to contact BAE at working hour from 09:00 to 15:00 Western Indonesian Time with the following address: Satrio Tower, 9th Floor 2A, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia, Telp: (+6221) 25984818, Fax: (+6221) 25984819, e-mail: [dividen@bimaregistra.co.id](mailto:dividen@bimaregistra.co.id) by submitting:
    - Photocopy of valid personal identity proof (ID Card/Driving License/Passport) and to show the original (for individual Shareholder);
    - Power of Attorney with sufficient stamp duty (*meterai*), if a Shareholder is represented by other parties, accompanied by a photocopy of valid personal identity proof of both the grantor and the applicant of the Power of Attorney;
    - Photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, the latest Deeds of Reinstatement of the Board of Commissioners and the Board of Directors or the Authorized Personnel representing the legal entity and the applicable copies of the identity of the Board of Directors/proxies or authorized officers to act on behalf of such legal entity (for shareholder who is a legal entity);
  - Notify the Bank account number (shareholder's account).
- BAE will issue Notice of Dividend Payment (*Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen* - "SPPD") to the shareholders who claimed as a proof that their Dividend has been claimed.
- The Company will pay dividend to Shareholders through bank transfer after obtaining confirmation and validation from BAE.
- Dividend to be distributed shall be subject to tax according to applicable tax regulations.
- For shareholders who are the Foreign Taxpayers (*Wajib Pajak Luar Negeri* or abbreviated as WPLN) and whose country has Tax Treaty Agreement, whom intend to request tax deductions by adjusting to the rate applicable in the Tax Treaty, shall send/submit Certificate of Domicile (COD) in the form of:
  - Original Directorate General of Taxation ("DGT") form that is still valid and has been filled in correctly, completely, signed, and approved by the Competent Authority or the competent authority in the local country (validation can be replaced with an original Certificate of Residence (CoR)); or
  - COD Receipt from the Directorate General of Taxes system in term of the Foreign Taxpayers has already transacted with Tax Withholder in Indonesia and has provided the original DGT form as referred to in point 6.a. above to the Tax Withholder in Indonesia;

no later than the date as specified in the KSEI's announcement, to:

- KSEI for shareholders whose shares are listed in the Collective Custody of KSEI (*scripless*), through the Account Holder (Securities Company/Custodian Bank) appointed by the shareholders;
- BAE of the Company for shareholders whose shares are still in the form of script.

In the event of original DGT has not been received on the above date, then the withholding tax shall be calculated at 20%.

For shareholders who are the Domestic Taxpayers (*Wajib Pajak Dalam Negeri* or abbreviated as WPDN), both individuals and Entities, shall subject to the provisions in accordance with the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (or known as "the Omnibus Law") and its derivative regulations.

This announcement is also available at the Company's website ([www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)).

Jakarta, 13 April 2021

Board of Directors

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 - South Jakarta 12190

Telp: (+6221) 250 5252; Fax: (+6221) 252 6749;

e-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id); Website: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)